

BAB VI

PENUTUP

Pada Bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat diambil serta saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Pada faktor uang persediaan, yang menjadi permasalahannya adalah terlambat masuknya uang persediaan membuat program atau kegiatan yang dianggarkan tidak bisa dilaksanakan di triwulan I dan II. Badan keuangan baru mulai memacu kegiatan-kegiatannya di triwulan III dan IV saat ketersediaan uang sudah ada. Sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja.
2. Pada faktor Dana Alokasi Umum, yang menjadi permasalahannya adalah transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang datang terlambat membuat proses pembayaran gaji pegawai terlambat, sehingga realisasi belanja tidak langsung di triwulan I dan II rendah. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja.
3. Pada faktor regulasi, yang menjadi permasalahannya adalah adanya regulasi dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh setiap SKPD sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pusat sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran karena harus dilakukan penyesuaian anggaran.
4. Pada faktor administrasi, yang menjadi permasalahannya adalah adanya kesalahan pemakaian akun belanja, kesalahan dalam pengetikan dan salah

redaksi yang dapat menghambat penyerapan anggaran. Kesalahan-kesalahan tersebut sering terjadi karena diberikannya beban kerja yang tinggi kepada pegawai sehingga pegawai sering merasa kelelahan dan menjadi kurang fokus dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

5. Pada faktor sumber daya manusia, sumber daya manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah belum berkompeten sehingga dapat membuat penumpukan tugas yang menyebabkan penyerapan anggaran dalam instansi kurang optimal.
6. Pada faktor pengadaan barang dan jasa yang menjadi permasalahannya Pejabat pengelola keuangan terlambat mengajukan kerangka acuan kerja kepada unit layanan pengadaan, terlambatnya penandatanganan kontrak, serta pembayaran untuk para kontraktor pada triwulan keempat yang membuat penyerapan anggaran terlihat seperti cenderung dipaksakan.
7. Pada faktor komitmen organisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang memiliki aturan nilai yang tegas dalam menerapkan konsep komitmen sebagai suatu kerangka berpikir yang sama, sehingga terjadi kecocokan antara nilai dengan pegawai yang cenderung dipaksakan dapat menghambat pemecahan masalah yang bersifat kreatif dan dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

6.2 Saran

1. Pada faktor uang persediaan, pemerintah perlu mengupayakan ketepatan waktu dalam memberikan uang persediaan agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik.

2. Pada faktor Dana Alokasi Umum, pemerintah harus berupaya untuk mengatasi penyebab yang membuat transfer dana DAU terlambat, agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji pegawai dan kegiatan yang direncanakan.
3. Pada faktor regulasi, Badan Keuangan Daerah harus lebih mengantisipasi terhadap perubahan-perubahan regulasi agar tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran.
4. Pada faktor administrasi, perlu melakukan evaluasi kembali kebutuhan kerja pegawai, agar tidak terjadi penumpukan tugas atau beban kerja yang tinggi.
5. Pada faktor Sumber Daya Manusia, demi meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), diharapkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang atau setiap SKPD perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan serta pengembangan agar para pegawai lebih berkompeten.
6. Pada faktor pengadaan barang dan jasa, perlu membuat suatu kebijakan yang lebih tegas kepada setiap pejabat pengelola keuangan yang terlambat mengajukan kerangka acuan kerja kepada unit layanan pengadaan.
7. Pada faktor komitmen organisasi, sebaiknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tidak menerapkan nilai yang tegas untuk harus menerima konsep komitmen sebagai suatu kerangka berpikir yang sama, karena dalam instansi tersebut terdapat berbagai banyak kepentingan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi pertama. Jakarta .Salemba Empat
- Abdul Halim. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta, Salemba Empat
- Christina Tukan. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018”. skripsi. Ekonomika dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira, Kota Kupang.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Kuncoro, Mudrajad, 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogysakarta: Penerbit Andi
- Milasih, Retno. 2012. Analisis Keterlamabatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementrian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Nomor 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberiaan Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.